

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2022

Rully Indra Prabasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

rullyindra1905@gmail.com

Didit Purnomo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta

dp274@ums.ac.id

Abstrak

Pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam meningkatkan pelayanan dan kebutuhan di berbagai sektor salah satunya sektor publik, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan alokasi belanja modal yang lebih tinggi guna pembangunan sektor-sektor yang bermanfaat pada masing-masing daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh PAD, DAU, dan belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis data panel. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data cross section 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2019-2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022. Meskipun dari ketiga variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya hanya sedikit. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Kelemahan kualitas SDM aparatur, dan jumlah belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja modal dimana alokasi DAU banyak tersedot untuk belanja pegawai.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, Belanja Modal

Abstract

The implementation of fiscal decentralization in improving services and needs in various sectors, one of which is the public sector, gives regional governments the authority to provide higher capital expenditure allocations for the development of useful sectors in each region. This research aims to analyze the extent of the influence of PAD, DAU and capital expenditure on economic growth in Central Java Province in 2019-2022. The research method used is panel data analysis. This research uses secondary data in the form of cross section data from 35 districts/cities of Central Java Province during the period 2019-2022. The research results show that PAD, DAU and capital expenditure have a positive effect on economic growth in Central Java Province in 2019-2022. Even though the three variables have an influence on economic growth, their influence is only small. Lack of regional sensitivity in discovering cultural advantages and original regional potential. Relatively low compliance and awareness of taxpayers or levies. Weak legal system and regional revenue administration. Weakness in the quality of human resources for the apparatus, and the amount of personnel expenditure which is much greater than capital expenditure where much of the DAU allocation is used for personnel expenditure.

Keywords: Economic Growth, PAD, DAU, Capital Expenditure



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Secara umum pertumbuhan ekonomi merupakan proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu.¹ Pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan bagaimana kondisi perekonomian suatu wilayah mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Disini kita melihat aspek dinamis dari suatu perekonomian, yaitu bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu. Tekanannya ada pada perubahan atau perkembangan itu sendiri.²

Peningkatan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan dari suatu negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan perekonomian di suatu negara dalam mencapai nilai yang layak dalam kurun waktu tertentu. Salah satu ukuran yang paling penting pada konsep ekonomi yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), ini digunakan untuk mengukur total nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu daerah.³ Memasuki era desentralisasi fiskal saat ini diharapkan terjadi perbaikan pelayanan di berbagai sektor, salah satunya sektor publik, dengan adanya perbaikan pelayanan di sektor publik akan mampu meningkatkan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut.⁴

Peningkatan pertumbuhan ekonomi bisa saja terjadi tercermin dari keberhasilan pelaksanaan program pemerintah dalam mengalokasikan pendapatan dan merencanakan pengeluaran. Berikut merupakan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

Tabel 1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2019	99,99
2020	100,1
2021	100,3
2022	100,2

Sumber: BPS

¹ Rulan L Manduapessy, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika," *Jurnal Kritis* 4, no. 2 (2020): 39–57.

² Muhammad Syukri dan Hinaya Hinaya, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan," *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting* 2, no. 2 (2019): 30–37, <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>.

³ Jefri Alfin Sinaga, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ekuilnomi* 2, no. 1 (2020): 40–48, <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>.

⁴ Novima Mustika Sari dan Eni Setyowati, "Analisis Determinan PDRB di Pulau Bali Tahun 2010-2020," *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 109–19.

Dari Tabel 1, dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2019 sampai 2022 mengalami penurunan dan peningkatan. Penurunan dan peningkatan tersebut masih bisa dikatakan normal karena tidak terlalu banyak kenaikan dan penurunan.

Sesuai dengan sistem pemerintahan Indonesia yaitu desentralisasi, maka pembangunan bangsa ini dimulai dari pembangunan daerah/provinsi. Adanya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah dapat mengatur jalannya pemerintahan di daerah pimpinannya untuk membangun kesejahteraan masyarakatnya. Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi peran pemerintah dalam mengatur tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia yang jumlahnya sangat banyak. Terkait hal tersebut perlu adanya penerimaan/pendapatan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. salah satu sumber pendapatan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵ Pendapatan daerah mengalami kenaikan atau penurunan tergantung dari seberapa besar sumber-sumber keuangan daerah mampu menghasilkan pendapatan bagi daerahnya. Pendapatan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam daerah karena digunakan untuk membiayai segala program-program yang direncanakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.⁶ Salah satu sumber PAD yaitu pajak daerah, pajak daerah ini memiliki sifat memaksa namun sesuai dengan perundang-undangan. Pajak daerah ini akan digunakan untuk keperluan umum. Berikut adalah pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

Tabel 2 Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (PAD) %
2019	104,47
2020	90,89
2021	107,02
2022	100,58

Sumber: DJPK

Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 13,38 %, dan pada tahun 2020 ke 2021 pendapatan asli daerah mengalami peningkatan sebesar 16,13 %, namun pada tahun 2022 pendapatan asli daerah provinsi Jawa Tengah Kembali mengalami

⁵ Prima Rosita Arini dan Manggar Wulan Kusuma, "Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening," *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* 5, no. 1 (2019): 28–38, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1263>.

⁶ Ni Putu Gina Sukma Antari dan Ida Bagus Panji Sedana, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah," *E-Jurnal Manajemen unud* 7, no. 2 (2018): 1080–1110.

penurunan sebesar 6,44 %. Kemungkinan penurunan ini dapat disebabkan karena pengeluaran daerah yang besar.

Sumber pendapatan yang lain yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sejumlah dana yang didapat dari pemerintah pusat dengan tujuan mengurangi ketimpangan keuangan beserta layanan publik antar daerah. Pengalokasian DAU ditentukan dengan besar tidaknya celah fiskal suatu daerah, yang merupakan perbedaan antara kebutuhan daerah juga potensi daerah.⁷ Dana Alokasi Umum diberikan kepada seluruh kabupaten dan kota untuk tujuan mengisi *gap based formula* tertentu dan umum menunjukkan bahwa daerah miskin dan tertinggal harus menerima lebih banyak daerah yang sangat kaya. Selain itu luas lahan dan jumlah penghuni juga menjadi hal yang wajib diperhatikan alokasi DAU.⁸ Dengan kata lain, tujuan dari pengalokasian DAU dalam APBD merupakan hal yang penting kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemerintah daerah di Indonesia. Berikut merupakan Dana Alokasi Umum dari provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

Tabel 3 Dana Alokasi Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Persentase (%)
2019	38.966,17	38.960,88	98,99
2020	35.684,61	35.323,98	99,99
2021	34.967,45	34.967,45	100
2022	34.973,79	34.973,79	100

Sumber: DJPK

Dapat dilihat Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan. Pengalokasian DAU pada tahun 2019 dan 2020 tidak mencapai 100% namun pada tahun berikutnya pengalokasian DAU mencapai 100%. Dana Alokasi Umum sendiri dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat daerah.

Dalam upaya mensejahterakan masyarakat, pemerintah daerah juga dapat melakukan pembangunan pada sarana dan prasarana yang ada di daerahnya dengan belanja modal. Belanja modal ini nantinya akan memberikan manfaat jangka panjang guna meningkatkan pertumbuhan

⁷ Rahmat Daim Harahap, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Meilya Evita Syari, "Pengaruh DAU dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening," *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 247–60.

⁸ Rahayu Intan Lestari dan Prayitno Basuki, "The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government," *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* 07, no. 01 (2024): 62–70, <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>.

ekonomi.⁹ Peningkatan belanja modal diharapkan akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik juga mampu meningkatkan tingkat partisipasi publik terhadap pembangunan yang tercermin pada peningkatan PAD.¹⁰

Belanja daerah yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung (permendagri nomor 25 tahun 2009), merupakan pengalokasian dana yang harus dilakukan secara efektif dan efisien, dimana belanja daerah dapat menjadi tolak ukur keberhasilan otonomi daerah. Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Berikut merupakan belanja modal Provinsi Jawa Tengah tahun 2019-2022.

Tabel 4 Belanja Modal Provinsi Jawa Tahun 2019-2022

Tahun	Anggaran (Miliar)	Realisasi (Miliar)	Presentase
2019	15.421,45	15.513,38	100,6
2020	15.624,36	9.914,82	63,46
2021	12.950,03	11.376,72	87,85
2022	11.978,30	13.231,20	110,46

Sumber: DJPK

Pada Tabel 4, dapat dilihat tahun 2019 dan 2022 pengalokasian dana belanja modal melebihi dari anggaran yang ada, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 pengalokasian dana belanja modal tidak mencapai 100% bahkan pada tahun 2020 anggaran belanja modal hanya terpakai sebesar 63,46%.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dalam hal ini adalah melalui studi kepustakaan. Data tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik. Untuk melengkapi hasil olahan data sekunder, informasi-informasi yang berkaitan juga dikumpulkan melalui berbagai literatur serta surat kabar dan artikel yang diunduh melalui media internet. Data sekunder ini berbentuk data runtun waktu (*time series*) dan wilayah (*Cross Section*). Data *time series* merupakan data-data yang dikumpulkan secara periodik berdasarkan kurutan waktu, seperti dalam jam, hari, minggu, bulan, kuartal dan tahun. Data *time series* diambil dari tahun 2019-2022, sedangkan data *cross section* diambil di 35 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan data Pertumbuhan Ekonomi

⁹ S Yunus dan Amirullah, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh)," *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019): 186-189.

¹⁰ Agung Priambodo, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *EDAJ: Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2015): 1-9.

(*GRWOTH*), Pendapatan Asli Daerah (*PAD*), Dana Alokasi Umum (*DAU*), dan Belanja Modal (*BM*) dengan model ekonometrika sebagai berikut:

$$GROWTH_{it} = \beta_0 + \beta_1 PAD_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 BM_{it} + \varepsilon_{it}$$

di mana:

<i>GROWTH</i>	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
<i>PAD</i>	= Pendapatan Asli Daerah (miliar rupiah)
<i>DAU</i>	= Dana Alokasi Umum (miliar rupiah)
<i>BM</i>	= Belanja Modal (miliar rupiah)
ε	= <i>Error term</i> (faktor kesalahan)
β_0	= Konstanta
$\beta_1 \dots \beta_3$	= Koefisien regresi variabel independen
<i>i</i>	= Provinsi ke <i>i</i>
<i>t</i>	= Tahun ke <i>t</i>

Model ekonometrik di atas merupakan modifikasi dari model,¹¹ variabel yang diambil adalah Dana Alokasi Umum, selanjutnya ditambahkan variabel Pendapatan Asli Daerah dari model.¹² Kemudian variabel belanja modal diambil dari.¹³ Variabel Pendapatan Asli Daerah (*PAD*), Dana Alokasi Umum (*DAU*), Belanja Modal (*BM*) diduga berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (*GROWTH*).

Tahap estimasi analisis regresi data panel akan meliputi estimasi parameter model ekonometrik dengan pendekatan *Pooled Least Square* (*PLS*), *Fixed Effect Model* (*FEM*), dan *Random Effect Model* (*REM*); pemilihan model terestimasi terbaik dengan uji Chow dan uji Hausman dan jika diperlukan uji Lagrange Multiplier; uji kebaikan model pada model terestimasi terpilih; dan uji validitas pengaruh variabel independen pada model terestimasi terpilih.

¹¹ Syafrida Miftakhul Alifah dan Lintang Kurniawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (*PAD*), Dana Alokasi Umum (*DAU*), Dana Alokasi Khusus (*DAK*), Pajak Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 629–40.

¹² Jesika Nainggolan, Vecky A. J. Masinambow, dan Dennij Mandej, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasautara," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 2 (2024): 1–12.

¹³ Roshita Dwi Anggraeni dan Mahameru Rosy Rochmatullah, "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022)," *SEIKO: Journal of Management & Business* 7, no. 2 (2024): 12–20.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Uji Chow dan uji Hausman di muka, model *Fixed Effect Model (FEM)* terpilih sebagai model terestimasi terbaik. Hasil estimasi lengkap model *FEM* tersaji pada Tabel 5.

Tabel 5 Model Estimasi *Fixed Effect Model*

$\widehat{GROWTH}_{it} = -31,94184 + 0,020167PAD_{it} + 0,024368DAU_{it} + 0,011168 BM_{it}$
$(0,0005)^* \quad (0,0036)^* \quad (0,0087)^*$
$R^2 = 0,399621; DW = 2,448617; F = 1,834934; Prob. F = 0,009024$

Sumber: Lampiran 1. Keterangan: *Signifikan pada $\alpha = 0,01$; ** Signifikan pada $\alpha = 0,05$;

*** Signifikan pada $\alpha = 0,10$.

Uji Eksistensi Model Terestimasi *FEM*

Model eksis ketika setidaknya satu variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen (tidak semua koefisien regresi bernilai nol). Uji eksistensi model adalah uji *F*. Karena dalam model terestimasi terbaik *FEM (Fixed Effect Model)* terdapat 3 variabel independen, maka formulasi hipotesisnya adalah: $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$ (koefisien regresi keempat variabel nol atau model tidak eksis); $H_A: \beta_1 \neq 0 \vee \beta_2 \neq 0 \vee \beta_3 \neq 0$ (setidaknya terdapat satu koefisien regresi tidak sama dengan nol atau model eksis). H_0 akan diterima jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $F \leq \alpha$.

Dari Tabel 5, terlihat bahwa nilai *p* (*p value*), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik *F* bernilai 0,009024 ($< 0,01$); jadi H_0 ditolak. Simpulan, model terestimasi *FEM* eksis.

Interpretasi Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) menunjukkan daya ramal model terestimasi. Dari Tabel 5 terlihat nilai R^2 pada model *Fixed Effect Model (FEM)* sebesar 0,399621 artinya 40% variasi variabel pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal. Sisanya, sebesar 60%, dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Uji Validitas Pengaruh Variabel Independen Model Terestimasi *FEM*

Uji validitas pengaruh menguji signifikansi pengaruh dari variabel independen secara individual atau parsial. Uji validitas pengaruh memakai uji *t*. H_0 uji *t* adalah $\beta_i = 0$, variabel

independen ke i dalam model terestimasi tidak memiliki pengaruh signifikan; H_A -nya $\beta_i \neq 0$: variabel independen ke i dalam model terestimasi memiliki pengaruh signifikan. H_0 akan diterima jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t > \alpha$; H_0 akan ditolak jika nilai p (p value), probabilitas, atau signifikansi empirik statistik $t \leq \alpha$. Hasil uji validitas pengaruh dapat dilihat pada Tabel 6.

Pertumbuhan ekonomi di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2022 ternyata dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan belanja modal.

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Pengaruh

Variabel	Sig.t	Kriteria	Kesimpulan
<i>PAD</i>	0,0005	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
<i>DAU</i>	0,0036	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$
<i>BM</i>	0,0087	< 0,01	Signifikan pada $\alpha = 0,01$

Sumber: Lampiran, diolah.

Pembahasan

Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.¹⁴

PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian daerah, maka retribusi daerah dan pajak daerah yang dipungut, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah. Semakin besar penerimaan daerah, maka semakin besar kemampuan daerah untuk menyelenggarakan aktivitas dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rori dkk.,¹⁵ juga menemukan hal yang sama bahwa peningkatan PAD menunjukkan adanya partisipasi Masyarakat terhadap jalanya pemerintahan

¹⁴ Rudy Badrudin, *Ekonomika Otonomi daerah*, 2017.

¹⁵ Chindy Febry Rori, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013," *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 02 (2016): 243–54.

didaerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRBnya dari tahun ke tahun. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pada pertumbuhan ekonomi daerah sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektorjasa, dan sektor-sektor lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD. Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sisilia dan Harsono¹⁶ bahwa pendapatan asli daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Malang tahun 2010-2019.¹⁷ juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota se- Surabaya tahun 2015-2019. Penelitian lain yang mendukung penelitian ini dilakukan oleh Đurović-Todorović dkk.,¹⁸ dan Ahmad dkk.,¹⁹ bahwa pendapatan asli daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono dkk.,²⁰ bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dini dkk.,²¹ juga menemukan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wididarma dan Jember²² bahwa tidak adanya relasi antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi dilandasi oleh tidak

¹⁶ Maria Sisilia dan Harsono Harsono, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019," *Journal of Regional Economics Indonesia* 2, no. 1 (2021): 57–70, <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>.

¹⁷ Novita Dwi Indriyani dan Eko Wahyudi, "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik)," *Yos Soedarso Economics Journal (YEJ)* 3, no. 2 (2021): 1–18.

¹⁸ Jadranka Đurović-Todorović, Ivan Milenković, dan Branimir Kalaš, "The Relationship Between Direct Taxes and Economic Growth in Oecd Countries," *Economic Themes* 57, no. 3 (2019): 273–86, <https://doi.org/10.2478/ethemes-2019-0016>.

¹⁹ Shahzad Ahmad, Maqbool H. Sial, dan Nisar Ahmad, "Taxes and economic growth: an empirical analysis of Pakistan," *European Law Review* 8, no. 6 (2016): 01–01, <https://doi.org/10.21859/eulawrev-08062>.

²⁰ Nurharibnu Wibisono dkk., "Manajemen PAD dan Pengaruh Belanja Modal pada Pertumbuhan Bisnis dan Ekonomi Se-Bakorwil 1 Madiun," *Bisman* 7, no. 1 (2024): 75–88.

²¹ Siti Dini, Eva Agustina Br. Tarigan, dan Melva Nava Abeliana Siregar, "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh," *PARETO: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2021): 65–80.

²² Komang Wididarma dan Made Jember, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali," *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 10, no. 7 (2021): 2982–3010.

adanya kontra prestasi atau timbal balik yang seimbang antara tingkat penerimaan PAD dengan realisasi pemerintah dalam memaksimalkan layanan publik, sehingga tingkat produksi barang dan jasa yang dihasilkan tidak mencapai target. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal akan memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota. Hasil ini mengindikasikan bahwa telah terjadi ketimpangan PAD antar Kabupaten/Kota, sehingga memengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah yang satu sisi memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi sedangkan yang lainnya masih rendah. PAD secara umum berasal dari potensi daerah, sedangkan tidak semua daerah Kabupaten/Kota memiliki potensi yang besar (sektor pertambangan, kelautan, dan kehutanan), kemudian hanya dilandasi oleh penerimaan dari sektor pariwisata sehingga hasil penelitian ini mencerminkan timpangan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah Kabupaten/Kota.

Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dengan potensi daerah (*fiscal capacity*), DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada. Jumlah DAU secara keseluruhan ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri netto yang ditetapkan dalam APBN.²³ Teori *stewardship* menggambarkan pemerintah daerah dapat menggunakan dana alokasi umum untuk memberikan pelayanan kepada publik yang direalisasikan melalui belanja modal sehingga akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut menunjukkan bahwa dana alokasi umum yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur akan menentukan jumlah alokasi belanja modal dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya pemberian dana alokasi umum kepada masing-masing daerah maka akan meningkatkan

²³ Irfan Ferdiansyah, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah," *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44–52, <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.

pertumbuhan ekonomi, karena pemberian dana alokasi umum dapat menciptakan nilai tambah diberbagai sektor sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi ketimpangan fiskal adalah dengan mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN oleh pemerintah yang digunakan untuk membiayai kegiatan daerah dalam rangka otonomi. DAU seharusnya digunakan untuk membiayai belanja langsung yaitu belanja yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakatnya yang nantinya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerahnya masing-masing.²⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni²⁵ menemukan hal yang sama bahwa peran dari DAU sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, karena tujuan penting dari alokasi DAU adalah dalam rangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik antar pemda di Indonesia. Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan yang berasal dari dana perimbangan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Dana alokasi umum yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi. Penentuan dana alokasi umum dilakukan untuk memperhatikan kebutuhan suatu daerah. Hal ini mengindikasikan jika terjadi peningkatan dana alokasi umum maka kemandirian suatu daerah akan semakin rendah. Dana Alokasi Umum yang diperoleh pemerintah daerah akan dialokasikan untuk pembiayaan pemerintah daerah, salah satunya dalam bentuk belanja modal dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, jika DAU yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat pula.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sinaga²⁶ bahwa dana alokasi umum meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Simalungun tahun 2009-2018. Alifah dan Kurniawati²⁷ juga menemukan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota eks Karesidenan Surakarta pada tahun 2018 hingga tahun 2022. Penelitian yang dilakukan oleh Hlavacek dan Bal-Domanska²⁸ dan Awolusi dkk.,²⁹

²⁴ Lily Kusumawati dan I Gusti Bagus Wiksuana, "EKONOMI DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dala" 7, no. 5 (2018): 2592–2620.

²⁵ Sri Anita Wahyuni, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta," *Jurnal STEI Ekonomi*, 20, no. 20 (2020): 1–10.

²⁶ Sinaga, Purba, dan Panjaitan, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun."

²⁷ Alifah dan Kurniawati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi."

²⁸ Petr Hlavacek dan Beata Bal-Domanska, "Impact of foreign direct investment on economic growth in central and eastern European countries," *Engineering Economics* 27, no. 3 (2016): 294–303, <https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.3.3914>.

²⁹ Olawumi D. Awolusi dan Patrick Olufemi Adeyeye, "Impact of foreign direct investment on economic growth in Africa," *Problems and Perspectives in Management* 14, no. 2 (2016): 1–20.

juga menemukan bahwa dana alokasi umum meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Aminy³⁰ bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Mulyani dan Wirawan³¹ juga menemukan hal yang sama bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Suputra³² menemukan hasil yang berbeda bahwa DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan DAU yang diterima oleh daerah tidak digunakan untuk kegiatan yang bertujuan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah, sehingga peran DAU tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Seharusnya DAU yang diterima daerah dialokasikan untuk belanja pembangunan sebagai sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi tetapi DAU tersebut dialokasikan untuk belanja rutin, sehingga alokasi tersebut tidak tepat sasaran.

Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah tersedianya infrastruktur yang memadai. Tidak ada yang memungkiri betapa pentingnya peranan infrastruktur dalam aktivitas ekonomi suatu daerah. Beberapa fakta empiris menyatakan bahwa perkembangan kapasitas infrastruktur suatu daerah akan berjalan seiring dengan pertumbuhan output ekonomi daerah tersebut. Oleh karena itu, setiap daerah sekarang ini seolah-olah berlomba untuk meningkatkan pembangunan daerahnya. Di Indonesia sendiri pembangunan infrastruktur mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan percepatan penyediaan kuantitas dan kualitas infrastruktur yang dimilikinya. Di dalam struktur APBD, alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur dianggarkan dalam kelompok belanja modal.³³

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertambahan belanja modal yang juga berarti bertambahnya *social overhead capital* (SOC) termasuk didalamnya semakin meningkat dan baiknya infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Jika

³⁰ Muhammad Habibullah Aminy, Muhammad Sayuti, dan Ahmad Ridho Hidayat, "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 1 (2024): 30–45.

³¹ Heni Mulyani dan Aditya Riyadi Wirawan, "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel Moderasi," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2023): 3904–15, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1179>.

³² Ni Wayan Ratna Dewi dan I Dewa Gede Dharma Suputra, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 2 (2017): 1745–73, <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>.

³³ Dwi Saraswati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara," *Jurnal Akuntansi & Publik* 8, no. 2 (2018): 55–58.

pemerintah daerah menetapkan anggaran belanja modal atau pembangunan lebih besar dari pengaluan rutin, maka kebijakan ekspansi anggaran daerah ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizky dkk.,³⁴ menemukan hal yang sama bahwa berkaitan belanja modal dan pertumbuhan ekonomi, diperoleh hasil bahwa secara parsial belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila nilai belanja modal mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat karena memiliki pengaruh yang positif. Belanja modal memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dikarenakan realisasi belanja modal pemerintah dilaksanakan dengan baik dalam pembangunan infrastruktur publik. Pemerintah memperhatikan pengelolaan belanja modal dengan baik untuk menunjang investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintah melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari sisi kondisi maupun umur ekonomisnya sehingga pengadaan barang inventaris dapat dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gukat dan Ogboru³⁵ bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Nigeria periode 1981–2016. Al-Sharif dan Bino³⁶ juga menemukan bahwa perubahan belanja modal sebagai persentase terhadap PDB mempunyai keseimbangan jangka panjang dan mempunyai efek jangka pendek di Yordania selama periode waktu (1977-2016). Penelitian lain yang mendukung adalah penelitian yang dilakukan oleh Nopiani dkk.,³⁷ bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.³⁸ juga menemukan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali.

³⁴ Reza Lainatul Rizky, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis, “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia,” *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 5, no. 2 (2017): 9–16, <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4099>.

³⁵ Bonmwa Tontu Gukat dan Ishmael Ogboru, “An Empirical Analysis of Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria,” *Journal of Economics and Development Studies* 5, no. 3 (2017): 1–12, <https://doi.org/10.15640/jeds.v5n3a1>.

³⁶ Basema Al-Sharif dan Adel Bino, “The Role of Government Capital Expenditures in Economic Growth in Jordan,” *International Journal of Business and Economics Research* 8, no. 2 (2019): 69, <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190802.15>.

³⁷ Ni Made Nopiani, Wayan Cipta, dan Fridayana Yudiantmaja, “Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi,” *Jurnal Manajemen Indonesia* 4, no. 1 (2016).

³⁸ Desak Nyoman Utami dan I Gusti Bagus Indrajaya, “Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali,” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 10 (2019): 2195–2225.

Penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan³⁹ bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan Amirullah⁴⁰ menemukan hasil yang berbeda bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut dikarenakan belanja modal yang dianggarkan dan dilaksanakan tidak dapat langsung memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, dimana belanja modal butuh waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, kemudian pelaksanaan, baru dapat digunakan atau dimanfaatkan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Kemudian belanja modal untuk pembangunan tidak selalu langsung dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian, seperti pembelian tanah untuk aset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus menunggu untuk dibangun sarana dan prasarana baru dapat digunakan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama periode 2019-2022, menghasilkan beberapa kesimpulan bahwa Secara simultan ketiga variabel independen PAD, DAU, dan BM berpengaruh terhadap variabel pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengaruh total ketiga variabel independen ditunjukkan oleh koefisien determinasi yaitu sebesar 0,399621. Nilai tersebut menunjukkan bahwa total variasi pengaruh seluruh variabel independen terhadap pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 40%. Sedangkan sisanya sebesar 60% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Secara parsial, kenaikan Pendapatan Asli Daerah memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah meskipun hanya meningkat sebesar 0,02 persen. Kenaikan PAD diharapkan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Meskipun Dana Alokasi Umum hanya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02 persen di kabupaten/kota Jawa Tengah. Namun, tanpa adanya DAU akan berimbas negatif terhadap stabilitas keuangan daerah, stabilitas keuangan daerah yang terganggu ini akan berimbas pada pelaksanaan program-program pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang akan terganggu pula. Pengaruh belanja modal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi yang hanya 0,01 persen justru menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas dan kuantitas belanja modal.

³⁹ Nainggolan, Masinambow, dan Mandej, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasautara."

⁴⁰ Yunus dan Amirullah, "Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh)."

Meskipun dari ketiga variabel berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun pengaruhnya hanya sedikit. Kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan keunggulan budaya dan potensi asli daerah. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah. Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah. Kelemahan kualitas SDM aparatur, dan jumlah belanja pegawai yang jauh lebih besar dibanding belanja modal dimana alokasi DAU banyak tersedot untuk belanja pegawai. Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena belanja modal merupakan salah satu langkah bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik.

Penelitian ini penting dilakukan agar pembaca mendapatkan manfaat dan informasi serta pengetahuan lebih awal tentang perkembangan ekonomi daerah, potensi dan resiko yang dihadapi, serta kebijakan ekonomi yang diterapkan daerah-daerah lain terutama daerah yang ada di Indonesia. Selain itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan tahun penelitian. Setiap lokasi memiliki karakteristik unik yang tidak terdapat pada penelitian sebelumnya, dan tingkat urgensinya bervariasi setiap tahunnya karena fluktuasi perekonomian di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya mempunyai keterbatasan dalam hasil penelitiannya, sehingga meninggalkan kesenjangan yang ingin diatasi oleh penelitian ini. Selain itu, penelitian ini juga memiliki perbedaan dalam hal variabel, dengan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sehingga memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Shahzad, Maqbool H. Sial, dan Nisar Ahmad. "Taxes and economic growth: an empirical analysis of Pakistan." *European Law Review* 8, no. 6 (2016): 01–01. <https://doi.org/10.21859/eulawrev-08062>.
- Alifah, Syafrida Miftakhul, dan Lintang Kurniawati. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Pajak Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *Economics and Digital Business Review* 5, no. 2 (2024): 629–40.
- Al-Sharif, Basema, dan Adel Bino. "The Role of Government Capital Expenditures in Economic Growth in Jordan." *International Journal of Business and Economics Research* 8, no. 2 (2019): 69. <https://doi.org/10.11648/j.ijber.20190802.15>.
- Aminy, Muhammad Habibullah, Muhammad Sayuti, dan Ahmad Ridho Hidayat. "Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Lombok Tengah." *Jurnal Kompetitif: Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi* 10, no. 1 (2024): 30–45.
- Anggraeni, Roshita Dwi, dan Mahameru Rosy Rochmatullah. "Determinan Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Daerah (Studi Kasus Provinsi Jawa Tengah tahun 2019 – 2022)." *SEIKO : Journal of Management & Business* 7, no. 2 (2024): 12–20.

- Antari, Ni Putu Gina Sukma, dan Ida Bagus Panji Sedana. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah." *E-Jurnal Manajemen unud* 7, no. 2 (2018): 1080–1110.
- Arini, Prima Rosita, dan Manggar Wulan Kusuma. "Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Investasi Swasta di Indonesia dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Intervening." *JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta* 5, no. 1 (2019): 28–38. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i6.1263>.
- Awolusi, Olawumi D., dan Patrick Olufemi Adeyeye. "Impact of foreign direct investment on economic growth in Africa." *Problems and Perspectives in Management* 14, no. 2 (2016): 1–20.
- Badrudin, Rudy. *Ekonomika Otonomi daerah*, 2017.
- Dewi, Ni Wayan Ratna, dan I Dewa Gede Dharma Suputra. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 18, no. 2 (2017): 1745–73. <https://doi.org/10.24176/agj.v1i1.3321>.
- Dini, Siti, Eva Agustina Br. Tarigan, dan Melva Nava Abelian Siregar. "Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh." *PARETO : Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2021): 65–80.
- Đurović-Todorović, Jadranka, Ivan Milenković, dan Branimir Kalaš. "The Relationship Between Direct Taxes and Economic Growth in Oecd Countries." *Economic Themes* 57, no. 3 (2019): 273–86. <https://doi.org/10.2478/ethemes-2019-0016>.
- Ferdiansyah, Irfan, Dwi Risma Deviyanti, dan Salmah Pattisahusiwa. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah." *Inovasi* 14, no. 1 (2018): 44–52. <https://doi.org/10.29264/jinv.v14i1.3546>.
- Gukat, Bonmwa Tontu, dan Ishmael Ogoru. "An Empirical Analysis of Government Expenditure and Economic Growth in Nigeria." *Journal of Economics and Development Studies* 5, no. 3 (2017): 1–12. <https://doi.org/10.15640/jeds.v5n3a1>.
- Harahap, Rahmat Daim, Muhammad Ikhsan Harahap, dan Meilya Evita Syari. "Pengaruh DAU dan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Daerah sebagai Variabel Intervening." *At-Tijarah : Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 2 (2019): 247–60.
- Hlavacek, Petr, dan Beata Bal-Domanska. "Impact of foreign direct investment on economic growth in central and eastern European countries." *Engineering Economics* 27, no. 3 (2016): 294–303. <https://doi.org/10.5755/j01.ee.27.3.3914>.
- Indriyani, Novita Dwi, dan Eko Wahyudi. "Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Surabaya Raya (Surabaya, Sidoarjo, Gresik)." *Yos Soedarso Economics Journal (YEJ)* 3, no. 2 (2021): 1–18.
- Kusumawati, Lily, dan I Gusti Bagus Wiksuana. "EKONOMI DI WILAYAH SARBAGITA PROVINSI BALI Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana , Bali , Indonesia Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dala" 7, no. 5 (2018): 2592–2620.
- Lestari, Rahayu Intan, dan Prayitno Basuki. "The Effect of Economic Growth, Local Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, and Profit Sharing Fund on Capital Expenditure of The NTB Provincial Government." *International Journal of*

Multidisciplinary Research and Analysis 07, no. 01 (2024): 62–70.
<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i01-10>.

- Manduapessy, Rulan L. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika.” *Jurnal Kritis* 4, no. 2 (2020): 39–57.
- Mulyani, Heni, dan Aditya Riyadi Wirawan. “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel Moderasi.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 10 (2023): 3904–15. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i10.1179>.
- Nainggolan, Jesika, Vecky A. J. Masinambow, dan Dennij Mandej. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Minahasautara.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 24, no. 2 (2024): 1–12.
- Nopiani, Ni Made, Wayan Cipta, dan Fridayana Yudiatmaja. “Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *Jurnal Manajemen Indonesia* 4, no. 1 (2016).
- Priambodo, Agung. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi.” *EDAJ: Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2015): 1–9.
- Rizky, Reza Lainatul, Grisvia Agustin, dan Imam Mukhlis. “Pengaruh Penanaman Modal Asing, Penanaman Modal Dalam Negeri, dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi di Indonesia.” *e-Jurnal Perspektif Ekonomi dan Pembangunan Daerah* 5, no. 2 (2017): 9–16. <https://doi.org/10.22437/pdpd.v5i2.4099>.
- Rori, Chindy Febry, Antonius Y Luntungan, dan Audie O Niode. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013.” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 02 (2016): 243–54.
- Saraswati, Dwi. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan Sebagai Pemoderasi di Kabupaten/Kota Sumatera Utara.” *Jurnal Akuntansi & Publik* 8, no. 2 (2018): 55–58.
- Sari, Novima Mustika, dan Eni Setyowati. “Analisis Determinan PDRB di Pulau Bali Tahun 2010-2020.” *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 3, no. 1 (2023): 109–19.
- Sinaga, Jefri Alfin, Elidawaty Purba, dan Pawan Darasa Panjaitan. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Simalungun.” *Jurnal Ekuilnomi* 2, no. 1 (2020): 40–48. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.350>.
- Sisilia, Maria, dan Harsono Harsono. “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Malang Tahun 2010- 2019.” *Journal of Regional Economics Indonesia* 2, no. 1 (2021): 57–70. <https://doi.org/10.26905/jrei.v2i1.6182>.
- Syukri, Muhammad, dan Hinaya Hinaya. “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan.” *JEMMA: Journal of Economic, Management and Accounting* 2, no. 2 (2019): 30–37. <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>.
- Utami, Desak Nyoman, dan I Gusti Bagus Indrajaya. “Pengaruh PAD dan Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Bali.” *E-Jurnal EP Unud* 8, no. 10 (2019): 2195–2225.

Rully Indra Prabasari, Didit Purnomo: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2022

Wahyuni, Sri Anita. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta.” *Jurnal STEI Ekonomi*, 20, no. 20 (2020): 1–10.

Wibisono, Nurharibnu, Choirum Rendah Istiqaroh, Retno Iswati, dan Tatik Mulyati. “Manajemen PAD dan Pengaruh Belanja Modal pada Pertumbuhan Bisnis dan Ekonomi Se-Bakorwil 1 Madiun.” *Bisman* 7, no. 1 (2024): 75–88.

Wididarma, Komang, dan Made Jember. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.” *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* 10, no. 7 (2021): 2982–3010.

Yunus, S, dan Amirullah. “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten-Kabupaten di Provinsi Aceh).” *Jurnal Samudra Ekonomika* 3, no. 2 (2019): 186-189.